

Media Online	Radarsolo.jawapos.com
Tanggal	08 March 2023
Wilayah	Kabupaten Sukoharjo



## Lima Desa di Sukoharjo Tidak Peroleh Bankeu 2023 dari Pemkab

<https://radarsolo.jawapos.com/daerah/sukoharjo/08/03/2023/lima-desa-di-sukoharjo-tidak-peroleh-bankeu-2023-dari-pemkab/>

**RADARSOLO.ID** – Ternyata, tidak semua desa di Sukoharjo mendapatkan bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dari 150 desa, hanya 5 desa yang tidak mendapatkan bankeu dengan total anggaran Rp 15,6 Milyar.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mulai sebar bankeu ke Pemerintah Desa dengan total Rp 15,6 Milyar. Setidaknya anggaran tersebut akan disebar ke 1.138 titik kegiatan.

“Anggaran ini untuk kegiatan non fisik,” kata Maryadi, Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Selasa (7/3/2023).

Menurut Maryadi, dari 150 desa di Sukoharjo, ada 5 desa yang tidak mendapatkan bankeu itu. Hanya saja, Maryadi tidak tahu alasan kenapa 5 Desa itu tidak mendapatkan bankeu.

“Ya mungkin mendapatkan bantuan yang lain. Yang Rp 15,6 Milyar itu hanya untuk non fisik,” katanya.

Di jelaskan Maryadi, desa yang tidak dapat bankeu itu yakni, Desa Cabeyan, Kecamatan Bendosari; Desa Jangglengan, Desa Nguter dan Desa Tanjungrejo dari Kecamatan Nguter serta Desa Ponowaren, Kecamatan Tawang Sari.

Salah satu Desa yang tidak mendapatkan bankeu adalah Desa Jangglengan, Kecamatan Nguter. Sutoyo selaku Kepala Desa setempat mengakui jika desanya tidak mendapatkan jatah bankeu non fisik.

“Memang tidak dapat. Biar dialihkan ke Desa lain saja. Sengaja, tak lempar desa lain kok,” kata Sutoyo saat dikonfirmasi *Jawa Pos Radar Solo*, Selasa (7/3/2023).

Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani menjelaskan kegiatan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa merupakan kegiatan yang rutin dilakukan. Perlu adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Pemerintah Desa di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.

“Dengan sinergitas ini komunikasi akan terjalin dengan baik, diharapkan bagi pemerintah desa untuk menyiapkan *grand design* terkait potensi desa dan potensi terjadinya bencana, sehingga nanti program yang diusulkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Etik Suryani, Senin (6/3/2023).

Menurut Etik, Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan. Bantuan Keuangan diprioritaskan untuk masyarakat yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. (kwl/dam)